

ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

KABUPATEN MANGGARAI TAHUN ANGGARAN

2017-2021

SKRIPSI



Disusun Oleh:

Imaculata Rollick Ersam

12190462

PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS BISNIS

UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA

YOGYAKARTA

2023

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
SKRIPSI/TESIS/DISERTASI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Kristen Duta Wacana, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Imaculata Rollick Ersam
NIM : 12190462
Program studi : Akuntansi
Fakultas : Bisnis
Jenis Karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Kristen Duta Wacana **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*None-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**“ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
MANGGARAI TAHUN ANGGARAN 2017-2021”**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti/Noneksklusif ini Universitas Kristen Duta Wacana berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama kami sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 07 Juli 2023

Yang menyatakan



(Imaculata Rollick Ersam)

NIM.12190462

ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

KABUPATEN MANGGARAI TAHUN ANGGARAN

2017-2021

SKRIPSI



Disusun Oleh:

Imaculata Rollick Ersam

12190462

PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS BISNIS

UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA

YOGYAKARTA

2023

HALAMAN PENGAJUAN

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Bisnis Program Studi Akuntansi

Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat

Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Akuntansi

Disusun Oleh:

Imaculata Rollick Ersam

12190462

FAKULTAS BISNIS PROGRAM STUDI AKUNTANSI

DUTA WACANA
UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA

YOGYAKARTA

2023

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**“ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
MANGGARAI TAHUN ANGGARAN 2017-2021”**

telah diajukan dan dipertahankan oleh:

IMACULATA ROLLICK ERSAM

12190462

dalam Ujian Skripsi Program Studi Akuntansi

Fakultas Bisnis

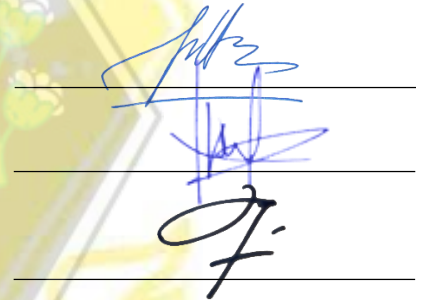
Universitas Kristen Duta Wacana

dan dinyatakan DITERIMA untuk menerima salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana
Akuntansi pada tanggal 22 Juni 2023

Nama Dosen

Tanda Tangan

1. Dra. Putriana kristanti, MM., Akt., CA
(Ketua Tim Penguji)
2. Dr. Murti Lestari, M.Si
(Dosen Penguji)
3. Dra. Xaveria Indri Prasasyaningsih, M. Si
(Dosen Pembimbing)



Yogyakarta, 04 Juli 2023

Disahkan Oleh,

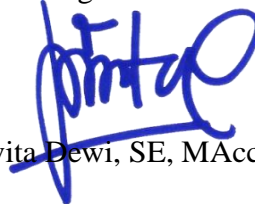
Dekan Fakultas Bisnis

Ketua Program Studi Akuntansi



Dr. Perminas Pangeran, SE., M. Si.
CMA.,CPA.

Christine Novita Dewi, SE, MAcc, Ak, CA.



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya menyatakan bahwa sesungguhnya skripsi dengan judul.

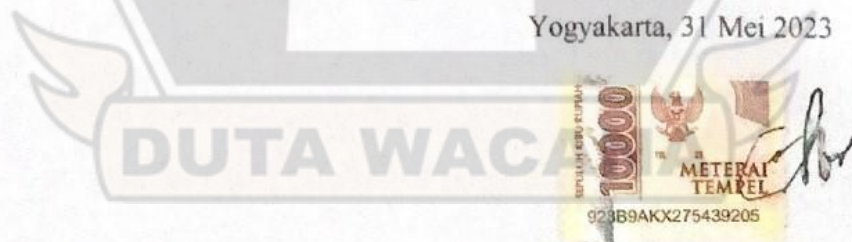
ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH

DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TAHUN ANGGARAN 2017-2021

yang saya kerjakan untuk melengkapi sebagian syarat untuk menjadi Sarjana pada Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta adalah bukan hasil tiruan atau duplikasi dari karya pihak lain di Perguruan Tinggi atau Instansi manapun, kecuali bagian yang sumber informasinya sudah dicantumkan sebagaimana mestinya.

Jika dikemudian hari didapati bahwa hasil skripsi ini adalah hasil plagiasi atau tiruan dari karya pihak lain, maka saya bersedia dikenai sanksi yakni pencabutan gelar saya.

Yogyakarta, 31 Mei 2023



IMACULATA ROLLICK ERSAM
12190462

HALAMAN MOTTO

“Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab
gada-Mu dan tongkat-Mu, itulah yang menghibur aku”

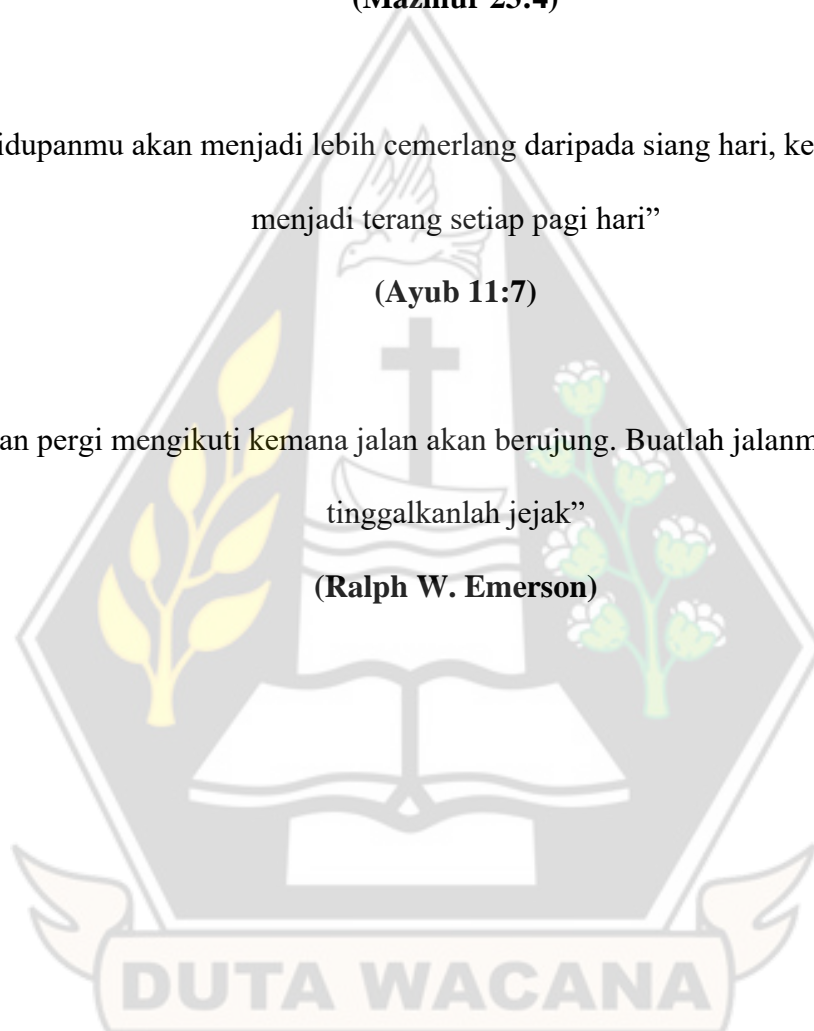
(Mazmur 23:4)

“Kehidupanmu akan menjadi lebih cemerlang daripada siang hari, kegelapan akan
menjadi terang setiap pagi hari”

(Ayub 11:7)

“Jangan pergi mengikuti kemana jalan akan berujung. Buatlah jalanmu sendiri dan
tinggalkanlah jejak”

(Ralph W. Emerson)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan kekuatan dan perlindungan selama mengerjakan skripsi ini
2. Dra. Xaveria Indri Prasasyaningsih, M. Si yang telah membimbing dan memotivasi saya selama pengerjaan skripsi
3. Kepada Bapa Maximus Ersam (Alm) dan Mama Yustina Ice yang selalu mendoakan dan memberi semangat, serta dukungan yang tidak ada habisnya selama proses perkuliahan hingga penulisan skripsi ini selesai
4. Kepada ketiga kakak saya, Erlin Ersam, Atrin Ersam, dan Maya Ersam, serta seluruh keluarga besar yang telah memberi semangat dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini
5. Kepada Immanuel Hammar yang selalu mendukung dan memotivasi saya dalam menyelesaikan skripsi ini
6. Kepada teman-teman seperjuangan Cantika Garus, Dewi Rohos, Dewi Syukur, dan Angeli Kamil yang selalu membantu dan mendukung selama mengerjakan skripsi ini
7. Kepada sepupu saya Agnes Nehes, Risa Harum, Claudia Nova dan Rifi Jebagut yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat selama mengerjakan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2017-2021. Penulisan skripsi ini dilakukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana S1 Akuntansi pada Fakultas Bisnis Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta. Penulis menyadari bahwa jika tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak selama proses perkuliahan hingga pada penyusunan skripsi ini, penulis akan mengalami kesulitan. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

- 1) Dra. Xaveria Indri Prasasyaningsih, M. Si selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini.
- 2) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Manggarai yang telah membantu saya untuk memperoleh data yang diperlukan selama penelitian ini.
- 3) Orang tua dan saudari-saudari saya yang telah memberikan bantuan baik material maupun nonmaterial untuk mendukung penyelesaian penelitian ini.
- 4) Sahabat-sahabat yang telah membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini

Akhir kata, penulis memohon maaf atas segala kekurangan dalam penelitian ini. Penulis juga akan menerima segala bentuk kritik dan saran yang akan dijadikan sebagai bahan evaluasi penulis. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan semua pihak yang membutuhkan.

Yogyakarta, 31 Mei 2023



Imaculata Rollick Ersam



DAFTAR ISI

HALAMAN PENGAJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN KEASLIAN SKRIPSI	60
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
ABSTRAK	xiv
<i>ABSTRACT</i>	xv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	4
1.3. Tujuan Penelitian.....	4
1.4. Kontribusi Penelitian.....	4
1.5. Batasan Penelitian	5
BAB II.....	6
TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1. Landasan Teori.....	6
2.1.1. Teori Sinyal (<i>Signaling Theory</i>).....	6

2.1.2.	Otonomi Daerah	7
2.1.3.	Keuangan Daerah	8
2.1.4.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).....	9
2.1.5.	Pendapatan Daerah.....	10
2.1.6.	Kinerja Keuangan Daerah.....	11
2.1.7.	Analisis SWOT	14
2.2.	Penelitian Terdahulu.....	16
BAB III	19
METODE PENELITIAN	19
3.1.	Jenis dan Metode Pengumpulan Data	19
3.1.1.	Teknik Analisa Data	20
3.2.	Langkah-langkah Penelitian.....	23
3.3.	Gambaran Umum Daerah.....	24
BAB IV	28
ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN	28
4.1.	Analisis Hasil	28
4.1.1.	Rasio Derajat Desentralisasi	28
4.1.2.	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.....	29
4.1.3.	Rasio Ketergantungan Daerah	30
4.1.4.	Rasio Pertumbuhan	31
4.1.5.	Rasio Efektivitas PAD.....	32
4.1.6.	Rasio Keserasian Belanja.....	33
4.1.7.	Rasio Efisiensi Keuangan Daerah.....	35
4.2.	Pembahasan	36

4.3. Analisis SWOT.....	39
BAB V.....	44
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....	44
5.1. Kesimpulan.....	44
5.2. Rekomendasi	45
DAFTAR PUSTAKA	47
LAMPIRAN.....	49

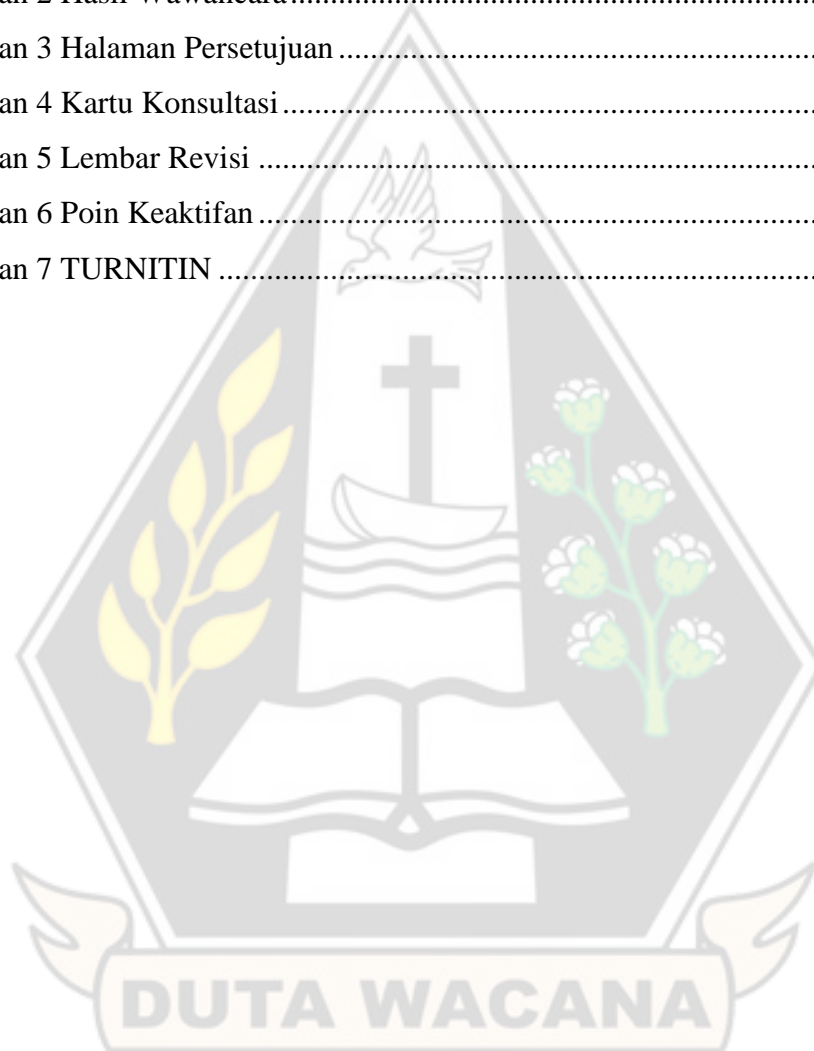


DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Kriteria Rasio Derajat Desentralisasi	20
Tabel 3. 2 Kriteria Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	20
Tabel 3. 3 Kriteria Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah.....	21
Tabel 3. 4 Kriteria Rasio Pertumbuhan.....	21
Tabel 3. 5 Kriteria Rasio Efektivitas PAD.....	22
Tabel 3. 6 Kriteria Rasio Keserasian Belanja	22
Tabel 3. 7 Kriteria Rasio Efisiensi Keuangan Daerah	23
Tabel 3. 8 Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Kabupaten Manggarai.....	25
Tabel 4. 1 Rasio Derajat Desentralisasi Pemerintah Kabupaten Manggarai Tahun 2017-2021	29
Tabel 4. 2 Rasio Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2017-2021	30
Tabel 4. 3 Rasio Ketergantungan Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2017-2021	31
Tabel 4. 4 Rasio Pertumbuhan Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2017-2021	32
Tabel 4. 5 Rasio Efektivitas PAD Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2017-2021	33
Tabel 4. 6 Rasio Keserasian Belanja Operasi keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Manggarai Tahun 2017-2021	34
Tabel 4. 7 Rasio Keserasian Belanja Modal keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Manggarai Tahun 2017-2021	34
Tabel 4. 8 Rasio Efisiensi Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2017-2021	35
Tabel 4. 9 Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai	39
Tabel 4. 10 Persentase Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai	40

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Data Keuangan Laporan Realisasi Anggaran	49
Lampiran 2 Hasil Wawancara	58
Lampiran 3 Halaman Persetujuan	60
Lampiran 4 Kartu Konsultasi	61
Lampiran 5 Lembar Revisi	63
Lampiran 6 Poin Keaktifan	64
Lampiran 7 TURNITIN	65



ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TAHUN ANGGARAN 2017-2021

Imaculata Rollick Ersam

12190462

Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis

Universitas Kristen Duta Wacana

oliickersam15@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Manggarai tahun anggaran 2017-2021, dengan mengukur kinerja pengelolaan keuangan daerah menggunakan rasio derajat desentralisasi, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio ketergantungan daerah, rasio pertumbuhan, rasio efektivitas PAD, rasio keserasian belanja dan rasio efisiensi keuangan daerah. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kabupaten Manggarai tahun anggaran 2016-2021. Teknik analisis dalam penelitian ini adalah menghitung dan menganalisis data menggunakan rasio derajat desentralisasi, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio ketergantungan daerah, rasio pertumbuhan, rasio efektivitas PAD, rasio keserasian belanja, dan rasio efisiensi keuangan daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Manggarai belum optimal, jika dilihat dari rasio derajat desentralisasi yang berada dalam kategori sangat rendah, tingkat kemandirian yang rendah sekali, dan memiliki ketergantungan secara finansial yang sangat tinggi kepada pemerintah pusat, serta masih belum mampu memaksimalkan PAD. Meski demikian, pemerintah Kabupaten Manggarai sudah merealisasikan PAD secara efektif dan mengalokasikan biaya untuk belanja operasi dan modal. Selain itu, aktivitas pendanaan yang dilakukan pemerintah Kabupaten Manggarai sudah cukup baik.

Kata Kunci: Rasio Derajat Desentralisasi, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Ketergantungan Daerah, Rasio Pertumbuhan, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Keserasian Belanja dan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah.

**ANALYSIS OF THE FINANCIAL PERFORMANCE OF THE LOCAL
GOVERNMENT OF MANGGARAI REGENCY FOR FISCAL YEAR 2017-2021**

Imaculata Rollick Ersam

12190462

Accounting Study Program Faculty of Business

Duta Wacana Christian University

oliickersam15@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine the financial performance of the local government of Manggarai Regency for the 2017-2021 fiscal year, by measuring the performance of regional financial management using the ratio of degrees of decentralization, regional financial independence ratio, regional dependence ratio, growth ratio, PAD effectiveness ratio, expenditure compatibility ratio and regional financial efficiency ratio. This type of research is descriptive quantitative. This study uses secondary data in the form of the Manggarai Regency Government's Budget Realization Report (LRA) for the 2016-2021 fiscal year. The analysis technique in this study is to calculate and analyze data using the degree of decentralization ratio, regional financial independence ratio, regional dependence ratio, growth ratio, PAD effectiveness ratio, expenditure compatibility ratio, and regional financial efficiency ratio. The results of this study show that in general the financial performance of the local government of Manggarai Regency has not been optimal, when viewed from the ratio of the degree of decentralization which is in the very low category, the level of independence is very low, and has a very high financial dependence on the central government and is still unable to maximize PAD. However, the Manggarai Regency government has effectively realized PAD and allocated costs for operating and capital expenditures. In addition, the funding activities carried out by the Manggarai Regency government are quite good.

Keywords: Decentralization Degree Ratio, Regional Financial Independence Ratio, Regional Dependency Ratio, Growth Ratio, PAD Effectiveness Ratio, Expenditure Compatibility Ratio and Regional Financial Efficiency Ratio.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara Indonesia disebut sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Ada 17.508 pulau di Indonesia. Terdapat kurang lebih 7.000 pulau yang berpenghuni. Selain itu, populasi penduduk di Indonesia juga mencapai ratusan juta jiwa. Banyaknya penduduk di Indonesia mendorong berbagai pihak, baik pemerintah maupun masyarakat sendiri untuk meningkatkan pembangunan dari berbagai aspek. Hal ini dilakukan agar pembangunan di seluruh wilayah Indonesia dilakukan secara merata sehingga tidak adanya kesenjangan. Pembangunan tidak hanya berupa sarana dan prasarana, melainkan juga dari aspek pemerintahan dan perekonomian setiap daerah. Pemerintah memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam pembangunan dan pemerataan di setiap daerah.

Negara Indonesia menganut asas otonomi seluas-luasnya dalam urusan pemerintahan. UU no. 23 tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah, mengungkapkan bahwa otonomi daerah adalah kewenangan yang dilimpahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah agar Pemda dapat mengatur serta mengurus urusan pemerintahan serta kebutuhan masyarakat secara mandiri. Keberhasilan otonomi daerah dapat diwujudkan melalui kinerja pemerintah daerah, jika pemerintah daerah mampu mengelola keuangannya secara efektif, efisien, akuntabel, transparan dan bertanggung jawab, serta mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Penilaian terhadap kinerja pengelolaan keuangan dapat dilihat dan dinilai dari laporan pertanggungjawaban keuangan daerah. Laporan pertanggungjawaban keuangan tersebut akan disusun oleh pemerintah daerah terhadap APBD (Harahap, 2020).

Untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan otonomi, yang harus dilakukan adalah mendorong daerah untuk dapat meningkatkan kreativitas dan menjadi lebih inovatif dalam merumuskan kebijakan pemerintah, terutama pada bidang keuangan. Dengan demikian, lembaga berwenang dalam hal ini adalah satuan kerja pengelola keuangan daerah, dituntut untuk mampu memenuhi tugasnya dalam meningkatkan PAD yang bertujuan untuk mengelola kelangsungan pembiayaan penyelenggaraan pemerintah serta pembangunan daerah agar pertumbuhan ekonomi daerah terus meningkat. (Rahmayati, 2016).

Berdasarkan UU no. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dijelaskan bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk menyusun dan melaporkan laporan keuangan Pemda terhadap pelaksanaan APBD kepada DPRD. Laporan keuangan tersebut yakni laporan realisasi APBD, catatan atas laporan keuangan, dan neraca laporan arus kas.

Mahmudi (2016) menjelaskan bahwa, Analisis Laporan Keuangan adalah aktivitas untuk menilai atau mengukur kinerja keuangan, dengan cara menafsirkan angka-angka dalam laporan keuangan tersebut, sehingga hasil yang diperoleh bisa dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan dari berbagai pihak, baik dari segi politik, sosial dan ekonomi. Penilaian terhadap kinerja keuangan Pemda, dilakukan melalui analisis laporan keuangan menggunakan beberapa rasio, yakni rasio derajat

desentralisasi, ketergantungan daerah, kemandirian keuangan daerah, pertumbuhan, efektivitas PAD, keserasian belanja, dan efisiensi keuangan daerah.

Beberapa peneliti sebelumnya juga turut meneliti terkait dengan kinerja keuangan pemerintah daerah, diantaranya Harahap (2020) yang mengungkapkan meskipun rasio derajat pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah masih dalam kategori rendah, namun kinerja keuangannya sudah cukup baik. Selain itu, Kabupaten Tapanuli Tengah juga masih bergantung secara finansial kepada pemerintah pusat dan provinsi. Hal ini disebabkan penerimaan PAD tidak memenuhi target yang telah dianggarkan.

Lubis & Hafni (2017) menyatakan tingkat kemandirian keuangan daerah di Kabupaten Labuhan Batu pada TA 2011-2013 tergolong rendah. Namun, tingkat efisiensi keuangan daerah sangat efisien. Selanjutnya, tingkat efektivitas keuangan daerah tahun 2011-2012 sangat efektif tetapi tidak efektif pada tahun 2013.

Rahmayati (2016), menemukan bahwa kinerja keuangan pemerintah di Kabupaten Sukoharjo terbilang belum baik. Penyebab utamanya adalah rendahnya tingkat kemandirian daerah. Rendahnya tingkat kemandirian daerah ini dapat dibuktikan melalui jumlah bantuan yang diterima dari pusat dan provinsi lebih banyak daripada PAD Kabupaten Sukoharjo sendiri, serta dana yang dimanfaatkan untuk belanja operasi lebih besar daripada belanja modal.

Berdasarkan paparan latar belakang penelitian tersebut, maka penulis terdorong untuk melaksanakan penelitian yang berjudul Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai TA 2017-2021.

1.2. Rumusan Masalah

Berlandaskan latar belakang masalah di atas maka perumusan dalam penelitian ini yaitu bagaimana kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Manggarai tahun anggaran 2017-2021 menggunakan rasio derajat desentralisasi, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio ketergantungan daerah, rasio pertumbuhan, rasio efektivitas PAD, rasio keserasian belanja, dan rasio efisiensi keuangan daerah?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu melakukan analisis terhadap kinerja keuangan Pemda Kabupaten Manggarai TA 2017-2021 menggunakan rasio derajat desentralisasi, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio ketergantungan daerah, rasio pertumbuhan, rasio efektivitas PAD, rasio keserasian belanja, dan rasio efisiensi keuangan daerah.

1.4. Kontribusi Penelitian

Besar harapan peneliti jika penelitian ini bisa memberikan manfaat berupa informasi, pengetahuan baru, saran, atau digunakan sebagai bahan referensi bagi pihak-pihak berikut ini:

1. Akademik

Adanya hasil penelitian ini, diharapkan bisa menjadi bahan masukan, informasi, serta menambah pengetahuan pengguna mengenai kinerja keuangan pemerintah daerah.

2. Peneliti

Penelitian ini dijadikan sebagai sarana dalam melatih peneliti untuk berpikir secara ilmiah yang berpacu pada berbagai bidang studi yang diterima selama proses perkuliahan dan dapat diterapkan dalam proses penyelesaian penelitian ini.

3. *Stakeholders*

Penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan pertimbangan para *stakeholder* ketika ingin mengambil keputusan, yang bertujuan untuk mengoptimalkan kinerja pemerintahan.

4. Pemerintah Daerah

Bagi pemerintah daerah Kabupaten Manggarai, penelitian ini bisa berguna sebagai informasi tentang kinerja keuangan pemerintah daerah. Dengan informasi yang diperoleh, pemerintah diharapkan dapat memperbaiki dan meningkatkan kinerja keuangannya.

5. Masyarakat

Untuk masyarakat, penelitian ini berguna sebagai informasi atas kinerja keuangan pemerintah daerah. Dengan informasi yang diperoleh, masyarakat dapat terdorong untuk menjalankan tugas dan tanggungjawab sebagaimana mestinya.

1.5. Batasan Penelitian

Berikut adalah keterbatasan dalam penelitian ini:

1. Penelitian ini hanya dilakukan di Pemerintahan Kabupaten Manggarai
2. Penelitian ini hanya menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Manggarai TA 2017-2021.
3. Rasio yang digunakan dalam penelitian ini hanya sebanyak 7 rasio, yakni rasio derajat desentralisasi, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio ketergantungan daerah, rasio pertumbuhan, rasio efektivitas PAD, rasio keserasian belanja, dan rasio efisiensi keuangan daerah.

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1. Kesimpulan

Menurut hasil penelitian serta pembahasan mengenai analisis kinerja keuangan Pemda Kabupaten Manggarai tahun 2017-2021 yang menggunakan rasio derajat desentralisasi, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio ketergantungan keuangan daerah, rasio pertumbuhan, rasio keserasian belanja operasi dan modal, dan rasio efisiensi keuangan daerah, dapat disimpulkan sebagai berikut ini:

1. Rasio derajat desentralisasi, menunjukkan bahwa tingkat kemampuan desentralisasi daerah Kabupaten Manggarai pada tahun 2017-2021 masih sangat rendah.
2. Rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan tingkat kemandirian keuangan daerah Pemda Kabupaten Manggarai berada pada kategori rendah sekali, dan memiliki pola hubungan instruktif. Artinya, pemerintah daerah Kabupaten Manggarai masih belum bisa memenuhi kebutuhan daerahnya secara mandiri.
3. Rasio ketergantungan keuangan daerah, menjelaskan bahwa Pemda Kabupaten Manggarai masih memiliki ketergantungan keuangan yang sangat tinggi kepada pemerintah pusat.
4. Rasio pertumbuhan, menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan daerah Kabupaten Manggarai masih rendah, artinya pemerintah daerah Kabupaten Manggarai masih belum mampu meningkatkan PAD.

5. Rasio efektivitas PAD, menunjukkan tingkat efektivitas Pemda Kabupaten Manggarai sudah efektif, artinya kinerja pemerintah daerah sudah cukup baik.
6. Rasio keserasian belanja, menunjukkan bahwa tingkat keserasian belanja operasi dan modal Pemda Kabupaten Manggarai sudah cukup baik.
7. Rasio efisiensi keuangan daerah, menunjukkan tingkat efisiensi keuangan di daerah Kabupaten Manggarai sudah cukup efisien, artinya pemerintah daerah telah melakukan aktivitas pendanaan secara efisien.

5.2. Rekomendasi

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, berikut ini adalah rekomendasi yang dapat diberikan penulis kepada pemerintah daerah Kabupaten Manggarai:

- a) Meningkatkan SDM dengan cara meningkatkan kualitas pendidikan di daerah Kabupaten Manggarai.
- b) Meningkatkan pembangunan dan pemerataan infrastruktur di daerah Kabupaten Manggarai, agar dapat menunjang arus perekonomian dan pertumbuhan daerah Kabupaten Manggarai.
- c) Memanfaatkan dan mengoptimalkan berbagai potensi yang dimiliki oleh daerah Kabupaten Manggarai, baik dari sektor kehutanan, pertanian, pariwisata serta budaya dengan cara melibatkan masyarakat setempat dan melakukan pelatihan tenaga kerja dan sosialisasi terkait manfaat yang akan diperoleh.
- d) Menunjang fasilitas pada sektor pariwisata seperti akses jalan, melakukan promosi wisata/budaya setempat, dan sebagainya, sehingga dapat menarik minat investor dari luar maupun dari dalam negeri

- e) Meningkatkan minat masyarakat dalam menunjang ekonomi kreatif, dengan cara memberikan sosialisasi kepada masyarakat serta membuka akses informasi yang mudah diperoleh melalui sosial media, papan iklan, media massa, dan sebagainya.
- f) Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban membayar pajak. Hal ini dapat dilakukan melalui sosialisasi kepada wajib pajak dan meningkatkan kinerja pemerintahan sehingga mendapatkan kepercayaan dari masyarakat.
- g) Mempublikasikan catatan atas laporan keuangan (CALK) pada *website* resmi pemerintah Kabupaten Manggarai atau badan yang mengelola laporan tersebut.

Keterbatasan penelitian ini, yaitu peneliti hanya melakukan analisis terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah pada tahun 2017-2021. Selain itu, rasio yang digunakan pada penelitian ini hanya 7 rasio.

Untuk penelitian selanjutnya, yang selaras dengan penelitian ini sebaiknya dapat menggunakan lebih banyak rasio atau menambahkan rasio lainnya seperti rasio aktivitas keuangan daerah, rasio kontribusi pajak dan retribusi daerah pada PAD, *debt service coverage ratio* dan sebagainya, untuk digunakan dalam menilai atau mengevaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah, sehingga hasil penelitian tersebut bisa lebih akurat dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

- Awani, M. F., & Hariani, S. (2021). Analisa Rasio Kemandirian Daerah dan rasio Keuangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *AKURASI*, 97.
- Ghozali, I. (2020). *25 Grand Theory*. Semarang: Yoga Pratama.
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2007). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Harahap, H. F. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 1.
- Khusaini, M. (2018). *Keuangan Daerah*. Malang: UB Press.
- Lantang, K. (2018). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Poso. *EKOMEN*, 20.
- Lubis, P. K., & Hafni, N. (2017). Analisis Rasio Keuangan untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhan Batu Tahun Anggaran 2011-2013. *KITABAH*, 1.
- Mahmudi. (2016). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2018). *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: ANDI.
- Mariani, L. (2013). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Sesudah Pemekaran Daerah (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota di Sumatera Barat). 10.
- Putri, R. S., & Munandar, A. (2021). Analisis Kinerja Keuangan Kota Malang Tahun Anggaran 2016-2020. *JIMEA*, 1-2.
- Rahmayati, A. (2016). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2011-2013. *EKA CIDA*, 2.
- Sulistyo, A. T. (2018). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. *Indonesian Treasury Review*, 3.
- Zuhri, M., & Soleh, A. (2016). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur. *Ekombis Review*, 1.
- Indonesia, P. R. (2003). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Indonesia, P.R. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014
Tentang Pemerintahan Daerah.

Indonesia, P.R. (2022). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022
Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah.

Indonesia, P.R. (1958). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun
1958 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah
Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara
Timur.

Indonesia, P.R. (2019). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun
2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Ardhini, A., & Handayani, S. R. I. (2011). Pengaruh Rasio Keuangan
Daerah Terhadap Belanja Modal Untuk Pelayanan Publik Dalam Perspektif
Teori Keagenan (Studi Pada Kabupaten Dan Kota Di Jawa Tengah) (Doctoral
Dissertation, Undip: Fakultas Ekonomika Dan Bisnis).

Fahmi, Irham. 2012. Analisis Kinerja Keuangan, Bandung: Alfabeta.

Sumarjo, H. (2010). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja
Keuangan Pemerintah Daerah.

Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior,
agency costs and ownership structure. *Journal of financial economics*, 3(4),
305-360.